

---

**DAMPAK TRANSFER FISKAL (CONDITIONAL GRANT) TERHADAP  
PEMBANGUNAN PERTANIAN, KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DI  
INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL**

✉<sup>1</sup>Nor Qomariyah, <sup>2</sup>Suharno, <sup>2</sup>D.S. Priyarsono

<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis, Universitas Trunojoyo Madura

<sup>2</sup>Institus Pertanian Bogor

Received: 20 Oktober 2016; Accepted: 31 Oktober 2017; Published: 06 November 2017

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/agriekonomika.v6i2.1874>

**ABSTRAK**

*Kemiskinan menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia, jumlah penduduk miskin sebesar 28.55 juta orang (11.47%), sementara ketimpangan pendapatan meningkat hingga mencapai 0.41 (BPS, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berupa conditional grant terhadap pembangunan pertanian, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan dengan data time series tahun 2009-2013 dan data cross section pada 11 provinsi di Indonesia. Metode untuk estimasi parameter menggunakan 2SLS. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DAK jalan dan irigasi dapat meningkatkan kinerja fiskal, sektor PDRB pertanian, total PDRB, dan total penyerapan tenaga kerja, tetapi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menurun disebabkan adanya kenaikan upah, menurunkan ketimpangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah pusat hendaknya meningkatkan injeksi dana langsung ke daerah lewat dana alokasi khusus (DAK) bidang infrastruktur karena dampaknya efektif menurunkan kemiskinan.*

*Keywords: Dana alokasi khusus, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, transfer fiskal.*

THE IMPACT OF FISCAL TRANSFER (CONDITIONAL GRANT) ON AGRICULTURAL DEVELOPMENT, POVERTY AND INEQUALITY : PANEL ANALYSIS DATA

**ABSTRACT**

*Poverty is the main problem in Indonesia, the number of the poor is 28.55 million people (11.47%), while income inequality increased until 0.41 (BPS, 2013). The main objective of this study was to evaluate the impact of Special Allocation Fund on agricultural development, poverty, and income inequality. This study uses simultaneous equation models with time series data of 2009-2013 and cross section data of 11 provinces in Indonesia. Method for parameter estimation is 2SLS. The simulation results show that the increased allocation of DAK road and irrigation can increase fiscal performance, the agricultural sector GRDP, total GRDP, but the labour force absorption of agricultural decreases because of the increasing of wages, the decreasing of income inequality and the reducing of poverty either in rural or urban areas. This study recommends that the central government should improve the injection of funds directly to the regions through a special allocation fund for rural infrastructure and agriculture because it gives an effective impact on poverty alleviation.*

*Keywords : Special allocation fund, poverty, income inequality, fiscal transfer.*

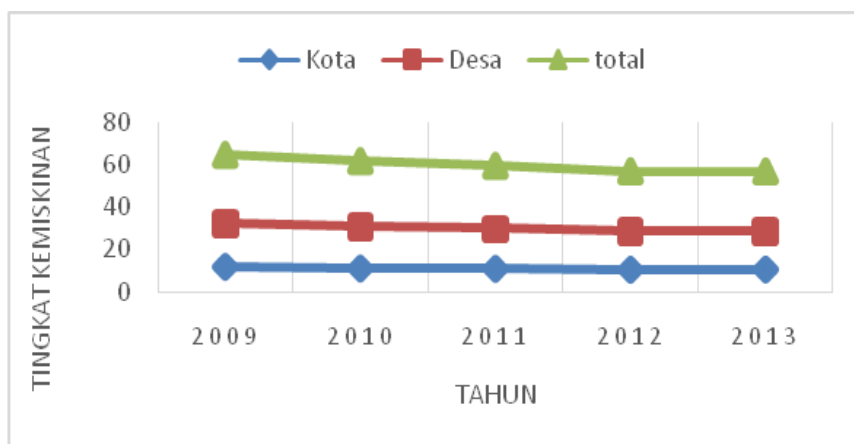
**PENDAHULUAN**

Tujuan pembangunan ekonomi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Todaro & Smith, 2016). Keberhasilan pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan seringkali dinilai dari perubahan tingkat kemiskinan. Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dalam rangka untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, sehingga studi analisis tentang kemiskinan pada era desentralisasi fiskal penting untuk dilakukan. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia, bahkan juga menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan di beberapa negara. Berdasarkan data BPS (2013), jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu sebesar 28.55 juta jiwa (11.47%). Kebijakan dan program pemerintah telah banyak dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, namun masih belum mencapai target yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, penurunan kemiskinan mengalami pertumbuhan yang negatif, sementara disisi lain ketimpangan semakin meningkat hingga mencapai 0.41 persen (Badan Pusat Statistik, 2013).

Ravallion & Datt (2002), menyatakan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus menurunkan ketimpangan

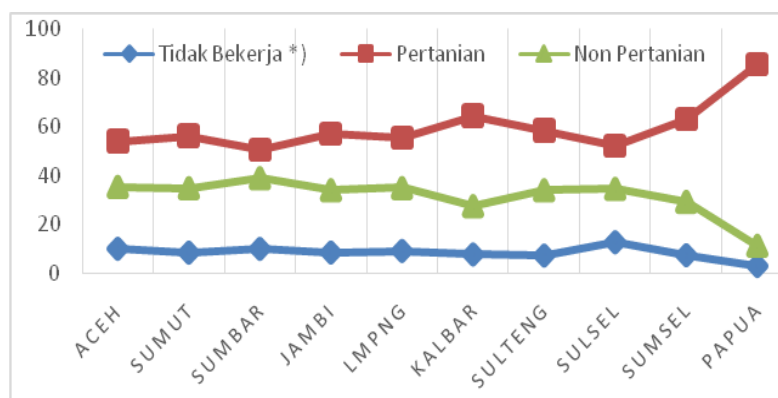
dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan *pro poor*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang memihak kepada penduduk miskin, dimana mayoritas penduduk miskin tinggal di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian sebagaimana data pada gambar 1 dan 2. Berdasarkan data BPS (2013), dari 28.55 juta penduduk miskin di Indonesia, 17.92 juta orang (63%) hidup dan tinggal di pedesaan dengan pertanian sebagai sumber pendapatan utamanya (Siregar & Wahyuni, 2007).

Untuk mendorong pertumbuhan *pro poor* inilah diperlukan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang diperuntukkan untuk sektor pertanian atau kawasan pedesaan, misalnya infrastruktur irigasi dan jalan mempunyai peran penting dalam memacu percepatan pertumbuhan *pro-poor*, sebab infrastruktur tersebut dapat memacu pertumbuhan produksi output serta dapat memudahkan akses petani dalam pendistribusian hasil produksi maupun menuju tempat kegiatan ekonomi. Terjadinya efisiensi akibat adanya infrastruktur yang memadai menjadikan biaya produksi semakin rendah yang kemudian menyebabkan harga produk semakin kompetitif. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produksi dan pendapatan petani (Sutarsono, 2012). Studi yang terkait juga dilakukan di India oleh Fan, Zhang, & Zhang



Sumber: BPS, 2013

**Gambar 1**  
**Tingkat Kemiskinan Desa-Kota 2009- 2013 di Indonesia**



Sumber: BPS, 2013

**Gambar 2**

### Tingkat Kemiskinan Sektoral pada Tahun 2013 di Beberapa Provinsi di Indonesia

(2002), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur pertanian (pengeluaran untuk R & D, irigasi), pendidikan dan pembangunan pedesaan, termasuk jalan dan listrik telah berkontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas pertanian dan sebagian besar juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Selain itu kesenjangan infrastruktur antar daerah juga akan menyebabkan kesenjangan pendapatan antar daerah.

Sejak tahun 2001 pemerintah telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, yakni kebijakan pengalihan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah yang diikuti dengan adanya transfer fiskal. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk efisiensi penyediaan pelayanan sektor publik di daerah terutama infrastruktur agar dicapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal ini karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kondisi masyarakatnya di daerahnya, sehingga diharapkan akan menciptakan layanan publik yang lebih baik (Bjornestad, 2009).

Bentuk komitmen pemerintah pusat dalam kebijakan desentralisasi fiskal adalah dengan mengalokasikan anggaran transfer fiskal ke daerah dalam APBN, yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan

dana transfer fiskal berupa *conditional transfer* yang di alokasikan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah yang menjadi prioritas nasional guna menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah serta pelayanan antar sektor. DAK dapat dijadikan kompensasi atas kekurangan pembiayaan pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat di daerah. Pendanaan infrastruktur pekerjaan umum (PU) selain berasal dari alokasi APBN juga berasal dari DAK. Walaupun jumlah DAK sangat kecil (hanya sekitar 7 persen) dibandingkan DAU (70 persen) dan DBH (23 persen) dalam total dana perimbangan, namun DAK berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah karena dapat menjadi komponen pembiayaan belanja modal (Bappenas, 2011). Sedangkan peran DAU sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa bagi daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah dipergunakan untuk membiayai belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak berpengaruh langsung terhadap pembangunan misalnya gaji pegawai. Dengan demikian DAK memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah (Usman, 2008).

Oleh karena itu, untuk mengetahui pengelolaan DAK benar-benar memenuhi prinsip efektif dan efisien, ekonomis, serta manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah maupun nasional maka konteks efisiensi dana *con-*

*ditional transfer* ini perlu di evaluasi dan dilihat kontribusinya secara makro dalam pencapaian indikator-indikator yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak DAK terhadap pembangunan pertanian, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Kajian ini menggunakan data panel agregat provinsi dan kabupaten/kota di 11 provinsi tahun 2009-2013. Sumber data berasal dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK KEMENKEU RI), Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (KEMEN-PUPERA), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan dalam penelitian ini adalah DAK bidang infrastruktur jalan, irigasi dan lainnya. Daerah yang menjadi objek penelitian adalah provinsi yang memiliki share PDRB pertanian lebih besar dibandingkan rata-rata share PDRB pertanian seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut adalah provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

### Metode Analisis Data

Analisis dampak transfer fiskal (*conditional transfer*) terhadap pembangunan pertanian, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan model ekonometrika sistem persamaan simultan dengan metode estimasi *Two Stage Least Squares* (2SLS) menggunakan program komputer SAS 9.3. Analisis simulasi kebijakan dilakukan pada periode historis tahun 2009-2013, yaitu dengan peningkatan DAK jalan dan DAK irigasi masing-masing sebesar 150 persen. Pemilihan angka besaran skenario tersebut berdasarkan dari data historis yang ada. Selain itu mengingat juga bahwa besaran alokasi DAK tidak

sampai mencapai satu persen terhadap APBN dan hanya 7.0 persen terhadap dana perimbangan. Sedangkan di sisi lain, juga adanya rencana kebijakan pemerintah kedepan yang akan meningkatkan DAK dalam jumlah besar karena melihat dampaknya terhadap perekonomian daerah sangat signifikan. Simulasi peningkatan DAK yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya ialah sebesar 10 persen hingga 80 persen, akan tetapi hasilnya kurang memberikan dampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Bapenas, 2011). Model dibentuk berdasarkan studi literatur di antaranya mengacu dari studi Budiyanto, dkk., (2014), Lisna, dkk., (2015), Sumedi (2013), Yannizar (2012), dan Nanga (2006), sebagaimana berikut ini.

Model persamaan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1.  $DJLN_{it} = a_0 + a_1KAPFIS_{it} + a_2TPOV_{it} + a_3LW_{it} + a_4D_{it} + a_5LDJLN_{it} + \mu_1$
2.  $DIRGS_{it} = b_0 + b_1KAPFIS_{it} + b_2TPOV_{it} + b_3D_{it} + b_4LDIRG_{it} + \mu_2$
3.  $INFR_{it} = DJLN_{it} + DIRGS_{it} + DINFL_{it}$
4.  $DAK_{it} = INFR_{it} + DAKPER_{it} + DAKLLI_{it}$
5.  $DAPER_{it} = DAU_{it} + DAK_{it} + DBH_{it}$
6.  $PDD_{it} = PAD_{it} + DAPER_{it} + PDL_{it}$
7.  $PAD_{it} = d_0 + d_1TPDRB_{it} + d_2PLD_{it} + d_3D_{it} + \mu_3$
8.  $KAPFIS_{it} = PDD_{it} - DAK_{it} - DAU_{it} - PDL_{it}$
9.  $BL_{it} = MDL_{it} + NMDL_{it}$
10.  $MDL_{it} = e_0 + e_1PAD_{it} + e_2INFR_{it} + e_3DAU_{it} + e_4DBH_{it} + e_5D_{it} + e_6LMDL_{it} + \mu_4$
11.  $PLD_{it} = BL_{it} + BTL_{it}$
12.  $PDRBA_{it} = f_0 + f_1TKA_{it} + f_2DAKPER_{it} + f_3DMDL_{it} + f_4LLSI_{it} + f_5TJLN_{it} + f_6D_{it} + \mu_5$
13.  $PDRBNA_{it} = g_0 + g_1TKNA_{it} + g_2MDL_{it} + g_3TJLN_{it} + g_4D_{it} + \mu_6$
14.  $TPDRB_{it} = PDRBA_{it} + PDRBNA_{it}$
15.  $TKA_{it} = h_0 + h_1UPHA_{it} + h_2PDRBA_{it} + h_3D_{it} + h_4LTKA_{it} + \mu_7$
16.  $TKNA_{it} = i_0 + i_1UPHNA_{it} + i_2PDRBNA_{it} + i_3D_{it} + i_4LTKNA_{it} + \mu_8$
17.  $TTK_{it} = TKA_{it} + TKNA_{it}$
18.  $UPHA_{it} = j_0 + j_1PDRBA_{it} + j_2TJLN_{it} + j_3D_{it} + j_4LUPHA_{it} + \mu_9$
19.  $UPHNA_{it} = k_0 + k_1PDRBNA_{it} + k_2TJLN_{it} + k_3D_{it} + k_4LUPHNA_{it} + \mu_{10}$
20.  $GINI_{it} = l_0 + l_1SPDRBA_{it} + l_2SPDRBNA_{it} + l_3D_{it} + l_4LGINI_{it} + \mu_{11}$
21.  $SPDRBA_{it} = PDRBA_{it} / TPDRB_{it} * 100$

22.  $SPDRBNA_{it} = PDRBNA_{it}/TPDRB_{it} * 100$   
 23.  $POVD_{it} = m_0 + m_1UPHA_{it} + m_2PENGDES_{it} + m_3GINI_{it} + m_4D_{it} + m_5LJMPD_{it} + \mu_{12}$   
 24.  $POVK_{it} = n_0 + n_1UPHNA_{it} + n_2PENGKOT_{it} + n_3GINI_{it} + n_4D_{it} + n_5LJPMK_{it} + \mu_{13}$   
 25.  $TPOV_{it} = POVD_{it} + POVK_{it}$

Dimana **DJLN** adalah Dana Alokasi Khusus Bidang infrastruktur Jalan (Rp Juta), **DIRGS** ialah Dana Alokasi Khusus Bidang infrastruktur Irigasi (Rp Juta), **DIN-FLL** adalah Dana Alokasi Khusus Bidang Infratraktur Lain-lain (Rp Juta), **KAPFIS**

adalah Kapasitas Fiskal (Rp Juta), **TPOV** adalah Total Penduduk Miskin (Jiwa), **LW** ialah Luas Wilayah (Rp Juta), **INFR** adalah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Rp Juta), **DAK** adalah Dana Alokasi Khusus (Rp Juta), **DAKPER** adalah Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (Rp Juta), **DAKLL** adalah Dana Alokasi Khusus Bidang Lainnya (Rp Juta), **DAPER** adalah Dana Perimbangan (Rp Juta), **DAU** adalah Dana Alokasi Umum (Rp Juta), **DBH** adalah Dana Bagi Hasil (Rp Juta), **PDD** ada-

**Tabel 1**  
**Hasil Validasi Model Dampak Transfer Fiskal terhadap Pembangunan Pertanian, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2009-2013**

No	Variabel Endogen	Actual Mean	Predicted Mean	Bias (UM)	Dist. (UD)	Koef. U	RSMPE
<b>Blok Kinerja Fiskal</b>							
1	DAK Infra Jalan	105438	105460	0.00	0.95	0.1796	41.2750
2	DAK Infra Irigasi	36249	36239.3	0.00	1.00	0.157	41.3953
3	DAK Infra lain-lain	23277.2	23287	0.00	1.00	0.1691	39.3090
4	DAK Infrastruktur	164965	164986	0.00	0.99	0.1656	38.1954
5	Total DAK	638973	582218	0.39	0.48	0.0691	11.7761
6	Dana Perimbangan	7601442	7544687	0.39	0.36	0.0056	1.0299
7	Pendapatan Asli Daerah	1592125	1591995	0.00	1.00	0.1228	36.9669
8	Kapasitas Fiskal	2613052	2612923	0.00	1.00	0.0789	20.0160
9	Pendapatan Daerah	10992787	10935902	0.01	0.97	0.0204	4.6463
10	Modal	2287875	2287911	0.00	1.00	0.0967	31.7422
11	Belanja Langsung	4840751	4840787	0.00	0.99	0.0449	15.0161
12	Pengeluaran Daerah	10418120	10418157	0.00	0.97	0.0207	7.2756
<b>Blok Perekonomian Sektoral</b>							
13	PDRB sektor pertanian	11068432	11065624	0.00	0.8	0.1279	38.9442
14	PDRB sektor non Pertanian	30515750	30512112	0.00	0.87	0.0995	28.0790
15	Total PDRB	41584182	41577736	0.00	1.00	0.0774	20.2912
16	Upah Pertanian	1.0164	1.0188	0.00	1.00	0.1196	22.9795
17	Upah Non Pertanian	12.3626	12.3213	0.00	1.00	0.035	7.4262
18	Tenaga Kerja Pertanian	1149478	1148923	0.00	1.00	0.042	8.4120
19	Tenaga Kerja Non Pertanian	1252262	1252246	0.00	0.91	0.0438	16.1788
20	Total Tenaga Kerja	2401740	2401170	0.00	0.97	0.0336	9.2855
21	Share PDRB sektor pertanian	27.9256	30.4901	0.07	0.29	0.1629	38.2862
22	Share PDRB sektor non Pertanian	72.0744	69.5099	0.07	0.29	0.0689	13.4029
<b>Blok Ketimpangan dan Kemiskinan</b>							
23	Indeks Gini	0.3616	0.3615	0.00	0.97	0.0391	8.1007
24	Jumlah Pdd Miskin Pedesaan	441090	440677	0.00	0.87	0.1882	1007.9
25	Jumlah Pdd Miskin Perkotaan	199186	202762	0.00	0.57	0.3919	185.7
26	Total Penduduk Miskin	640277	643439	0.00	0.81	0.2046	90.3432

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

lah Pendapatan Daerah (Rp Juta), **PDL** ialah Pendapatan Daerah dari lainnya (Rp Juta), **BL** merupakan Belanja Langsung (Rp Juta), **MDL** ialah Belanja Modal (Rp Juta), **NMDL** adalah Belanja Non Modal (Rp Juta), **BTL** merupakan Belanja Tidak Langsung (Rp Juta), **PLD** adalah Pengeluaran Daerah (Rp Juta), **PDRBA/NA** adalah Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian/Sektor Non Pertanian (juta rupiah), **TKA/NA** adalah Tenaga Kerja Sektor Pertanian/non Pertanian (jiwa), **UPHA/NA** adalah Rata-rata Upah Sektor Pertanian/Non Pertanian (ribu rupiah), **TJLN** adalah Total Jalan (km), **SPDRBA/NA** adalah *share* Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian/Non Pertanian (persen), **POVD/K** adalah Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan/Perkotaan, **PENGDES/KOT** adalah Pengeluaran Rata-Rata Penduduk Pedesaan/Perkotaan, **D** merupakan *dummy* variabel, dan **u** ialah Komponen error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Validasi Model

Indikator validasi statistik yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan membandingkan antara nilai *actual mean* dan *predicted mean* variabel endogen yang ditandai dari nilai masing-masing variabel endogen hasil estimasi mengikuti nilai data aktualnya selama periode pengamatan. Selain itu digunakan statistik proporsi bias (UM), proporsi distribusi (UD) dan statistik *Theil's inequality coefficient* (U) dan nilai RSMPE untuk mengevaluasi kemampuan model bagi analisis simulasi historis. Semakin kecil selisih antara *actual mean* dan *predicted mean* dan semakin kecil nilai U-Theil's, maka estimasi model semakin baik. Pada Tabel 1 ditunjukkan hasil validasi model dampak transfer fiskal terhadap pembangunan pertanian, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, secara umum rata-rata nilai prediksi dari variabel endogen mendekati rata-rata nilai aktualnya. Hampir semua nilai statistik proporsi bias (UM) mendekati nol, dan nilai proporsi distribusi (UD) mendekati satu, berarti model tidak terdapat bias sistemik. Sedangkan nilai U-Theil's juga mendekati nol artinya

model di anggap baik dan sudah mampu menjelaskan kondisi yang sebenarnya (Lisna dkk., 2015).

### Hasil simulasi Peningkatan DAK Infrastruktur Jalan dan Irigasi

Peningkatan DAK bidang infrastruktur jalan sebesar 150 persen pada Tabel 2, dapat meningkatkan besarnya alokasi DAK bidang infrastruktur, total DAK, dana perimbangan, pendapatan daerah, dan pengeluaran pemerintah daerah. Peningkatan DAK bidang infrastruktur jalan meningkatkan total DAK bidang infrastruktur dan total DAK masing-masing hingga mencapai 95 persen dan 27 persen, Hal ini dikarenakan kontribusi dari DAK jalan terhadap total DAK bidang infrastruktur cukup besar, yaitu 60.4 persen. Sedangkan dampaknya terhadap perekonomian adanya peningkatan PDRB dan upah sektoral. Sebagai akibat dari kenaikan tingkat upah yang lebih besar di sektor pertanian menyebabkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menurun. Sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian semakin meningkat, peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian maka total penyerapan tenaga kerja masih terjadi peningkatan. Selain itu hal ini mengindikasikan terjadinya proses transformasi struktural yang ditandai dengan adanya peningkatan pangsa sektor non pertanian terhadap PDRB disertai dengan menurunnya pangsa tenaga kerja sektor pertanian karena beralih ke sektor non pertanian. Menurut Yunisvita (2011), terjadinya transformasi ditandai dengan: (1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.

Indeks gini yang menunjukkan adanya ketimpangan mengalami penurunan sebesar 5.1 persen. Hal ini dikarenakan *share* PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB semakin meningkat, sehingga terjadi penurunan ketimpangan. Menurut hipotesis Kuznets (1955), bahwa pertumbuhan yang lebih besar pada sektor primer yaitu sektor pertanian lebih efektif memperbaiki distribusi pendapatan.

Sehingga adanya pertumbuhan ekonomi sektoral yang sekaligus di sertai dengan adanya distribusi pendapatan yang merata maka akan memperbaiki kondisi ke miskinian. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut hasil penelitian ini menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan baik di pedesaan maupun perkotaan. Dengan demikian simulasi peningkatan infrastruktur jalan sebesar 150 persen

**Tabel 2**  
**Dampak Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Jalan**  
**Tahun 2009-2013**

	Variabel Endogen	Satuan	Nilai Dasar	Perubahan (%)
<b>Blok Pendapatan dan Penerimaan Daerah</b>				
DJLN	DAK Infra Jalan	Rp Juta	105460	150.000
DIRGS	DAK Infra Irigasi	Rp Juta	36239.3	0.000
DINFL	DAK Infra lain-lain	Rp Juta	23287	-0.430
INFR	DAK Infrastruktur	Rp Juta	164986	95.788
DAK	Total DAK	Rp Juta	582218	27.144
DAPER	Dana Perimbangan	Rp Juta	7544687	0.518
PAD	Pendapatan Asli Daerah	Rp Juta	1591995	4.040
KAPFIS	Kapasitas Fiskal	Rp Juta	2612923	3.706
PDD	Pendapatan Daerah	Rp Juta	1093590	1.869
MDL	Modal	Rp Juta	2287911	16.734
BL	Belanja Langsung	Rp Juta	4840787	7.909
PLD	Pengeluaran Daerah	Rp Juta	1041815	3.675
<b>Blok Perekonomian</b>				
PDRBA	PDRB sektor pertanian	Rp Juta	1106562	7.345
PDRBNA	PDRB sektor non Pertanian	Rp Juta	3051211	0.280
TPDRB	Total PDRB	Rp Juta	4157773	8.214
UPHA	Upah Pertanian	Rp Juta	1.0188	0.452
UPHNA	Upah Non Pertanian	Rp Juta	12.3213	0.007
TKA	Tenaga Kerja Pertanian	Jiwa	1148923	-0.092
TKNA	Tenaga Kerja Non Pertanian	Jiwa	1252246	0.356
TTK	Total Tenaga Kerja	Jiwa	2401170	0.141
SPDRBA	<i>Share</i> PDRB sektor pertanian	persen	30.4901	4.127
SPDRBNA	<i>Share</i> PDRB sektor non Pertanian	persen	69.5099	- 1.810
<b>Blok Gini dan Kemiskinan</b>				
GINI	Indeks Gini	persen	0.3615	-5.090
POVD	Jumlah Pdd Miskin Pedesaan	Jiwa	440677	-0.180
POVK	Jumlah Pdd Miskin Perkotaan	Jiwa	202762	-0.803
TPOV	Total Penduduk Miskin	Jiwa	643439	-0.377

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

menunjukkan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan pembangunan pertanian, penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Sedangkan hasil simulasi peningkatan DAK irigasi sebesar 150 persen yang ditunjukkan pada tabel 3 dapat mengurangi porsi DAK jalan. Akan tetapi dapat me-

ningkatkan DAK bidang infrastruktur serta total DAK, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, kapasitas fiskal dan pendapatan daerah. Sebagaimana pada simulasi peningkatan DAK jalan, dampak simulasi DAK irigasi terhadap perekonomian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PDRB sektoral, karena DAK irigasi mem-

**Tabel 3**  
**Dampak Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Irigasi Tahun 2009-2013**

	Variabel Endogen	Satuan	Nilai Dasar	Perubahan (%)
<b>Blok Pendapatan dan Penerimaan Daerah</b>				
DJLN	DAK Infra Jalan	Rp Juta	105460	-0.012
DIRGS	DAK Infra Irigasi	Rp Juta	36239.3	150.000
DINFL	DAK Infra lain-lain	Rp Juta	23287	-0.171
INFR	DAK Infrastruktur	Rp Juta	164986	32.930
DAK	Total DAK	Rp Juta	582218	9.332
DAPER	Dana Perimbangan	Rp Juta	7544687	0.178
PAD	Pendapatan Asli Daerah	Rp Juta	1591995	1.495
KAPFIS	Kapasitas Fiskal	Rp Juta	2612923	1.372
PDD	Pendapatan Daerah	Rp Juta	1093590	0.654
MDL	Modal	Rp Juta	2287911	5.759
BL	Belanja Langsung	Rp Juta	4840787	2.722
PLD	Pengeluaran Daerah	Rp Juta	1041815	1.265
<b>Blok Perekonomian</b>				
PDRBA	PDRB sektor pertanian	Rp Juta	1106562	2.529
PDRBNA	PDRB sektor non Pertanian	Rp Juta	3051211	0.280
TPDRB	Total PDRB	Rp Juta	4157773	3.340
UPHsA	Upah Pertanian	Rp Juta	1.0188	0.157
UPHNA	Upah Non Pertanian	Rp Juta	12.3213	0.007
TKA	Tenaga Kerja Pertanian	Jiwa	1148923	-0.032
TKNA	Tenaga Kerja Non Pertanian	Jiwa	1252246	0.356
TTK	Total Tenaga Kerja	Jiwa	2401170	0.170
SPDRBA	Share PDRB sektor pertanian	Persen	30.4901	1.069
SPDRBNA	Share PDRB sektor non Pertanian	Persen	69.5099	-0.469
<b>Blok Gini dan Kemiskinan</b>				
GINI	Indeks Gini	Persen	0.3615	-5.090
POVD	Jumlah Pdd Miskin Pedesaan	Jiwa	440677	-0.062
POVK	Jumlah Pdd Miskin Perkotaan	Jiwa	202762	-0.803
TPOV	Total Penduduk Miskin	Jiwa	643439	-0.296

Sumber: Data Primer Diolah, 2016



punyai hubungan langsung dengan sektor pertanian maka peningkatan PDRB sektor pertanian lebih besar dari pada PDRB sektor non pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan DAK irigasi sangat berdampak positif terhadap pembangunan pertanian. Kemudian dampak peningkatan DAK irigasi terhadap penyerapan tenaga kerja, justru tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan, hal ini diduga karena adanya kenaikan upah pada sektor pertanian sebagaimana juga terjadi pada simulasi DAK jalan. Artinya bahwa peningkatan PDRB sektor pertanian akibat adanya kenaikan DAK irigasi dapat meningkatkan upah, selanjutnya upah tersebut dapat menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Namun karena penurunan tenaga kerja sektor pertanian masih lebih kecil di dibandingkan peningkatan tenaga kerja sektor non pertanian sehingga penyerapan tenaga kerja total tetap mengalami peningkatan. *Share* PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan terhadap total PDRB, dan sebaliknya terjadi penurunan *share* PDRB sektor non pertanian terhadap total PDRB. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan indeks gini atau ketimpangan pendapatan yang menyebabkan indeks gini semakin menurun. Sehingga berdampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan.

Dengan demikian simulasi peningkatan DAK infrastruktur jalan dan irigasi sebesar 150 persen dapat meningkatkan pembangunan sektor pertanian, penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan walaupun nilai perubahannya relatif kecil. Kemudian perubahan pada skenario peningkatan DAK jalan mempunyai dampak yang lebih besar dari pada peningkatan DAK irigasi.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi parameter dan simulasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa peningkatan DAK jalan dapat meningkatkan kapasitas fiskal, dan pendapatan daerah. Sedangkan jumlah tenaga kerja sektor pertanian menurun akibat adanya

peningkatan upah sektor pertanian, namun jumlah penyerapan tenaga kerja total meningkat, selanjutnya *share* PDRB sektor pertanian meningkat, ketimpangan menurun, dan jumlah kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan menurun. Sedangkan peningkatan DAK irigasi dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan pendapatan daerah, meningkatkan *share* PDRB sektor pertanian, menurunkan ketimpangan, dan juga menurunkan jumlah penduduk di pedesaan maupun perkotaan. Dengan demikian rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah pusat hendaknya meningkatkan injeksi dana langsung ke daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang infrastruktur jalan dan irigasi karena dampaknya efektif meningkatkan pembangunan sektor pertanian, menurunkan kemiskinan, dan sekaligus ketimpangan pendapatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, B. P. (2013). *Statistik Indonesia 2003*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2011). *Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jakarta.
- Bjornestad, L. (2009). Fiscal Decentralization, Fiscal Incentives, and Pro-Poor Outcomes: Evidence from Viet Nam. *ADB Economics*, (168).
- Budiyanto, Priyarsono, D. ., Sinaga, B. M., & Sudaryanto, T. (2014). Performa Belanja Pemerintah Daerah, Investasi Privat dan Kesempatan Kerja di Indonesia. *Kajian EKonomi Dan Keuangan*, 18(3).
- Fan, S., Zhang, L., & Zhang, X. (2002). *Growth, Inequality, and Poverty in Rural China*. *International Food Policy Research Institute*. Washington.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth And Income Inequality\*. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2015). Dampak Kapasitas

Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1–26.

Nanga, M. (2006). *Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia : Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. IPB (Bogor Agricultural University). Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40698>

Ravallion, M., & Datt, G. (2002). Why has economic growth been more pro-poor in some states of India than others? *Journal of Development Economics*, 68(2), 381–400. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(02\)00018-4](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(02)00018-4)

Siregar, H., & Wahyuni, D. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Economics Development*, 1–28. Retrieved from [http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS\\_2008\\_MAK3](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_MAK3)

Sutarsono. (2012). Hubungan Tata Kelola Pemerintahan, Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Disertasi*. INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Todaro, M., & Smith, S. (2016). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Jakarta: Erlangga.

Usman. (2008). Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Retrieved January 27, 2016, from [http://www.smeru.or.id/report/research/dak/dak\\_ind.pdf](http://www.smeru.or.id/report/research/dak/dak_ind.pdf)

Yannizar. (2012). Dampak Alokasi Pengeluaran Dana Pembangunan Pemerintah Daerah Dan Investasi Swasta Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Kemiskinan Provinsi. *Disertasi*. Institut Pertanian Bogor.